



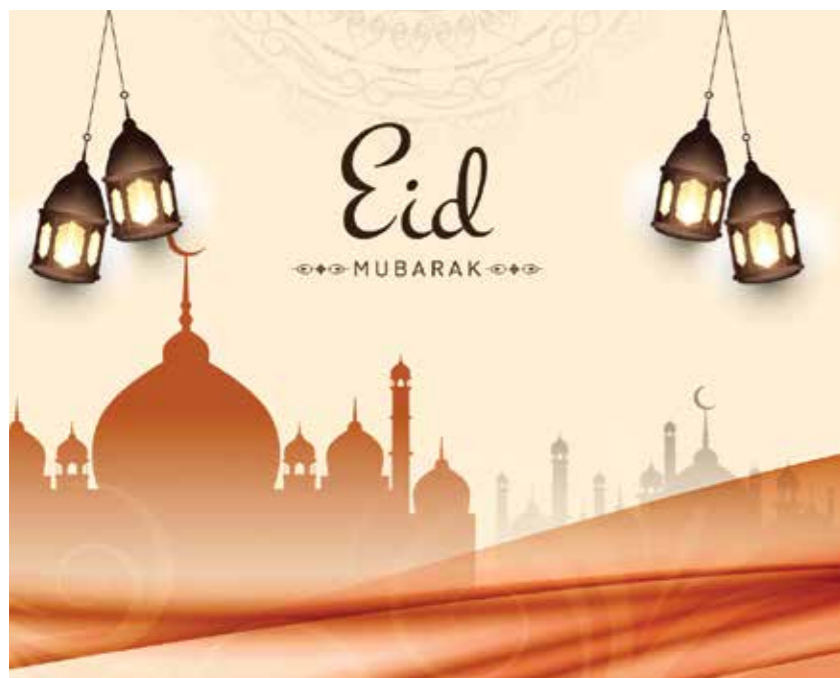
Cirebon Katon

Berita & Informasi Waki Rakyat

Nestapa Penganggur



Meraih Kemenangan dengan Saling Memaafkan



Gema takbir berkumandang, memuji dan meneguhkan asma-Nya. Suka cita terpancar pada tiap-tiap orang, tak terkecuali mereka yang biasa hidup dalam keterbatasan. Senyum kemenangan milik semua insan yang beriman. Benar kemenangan atau hanya ungkapan rasa senang?

Sebulan penuh kita dididik menahan diri dari rasa lapar, haus, dan amarah. Mengendalikan nafsu hewani dengan memperbanyak amal ibadah dan perilaku sosial yang saleh. Lantas apa yang terjadi pada kita setelahnya?

Amat rugi ketika hari raya idul fitri hanya dimaknai dengan selebrasi kesenangan, baju dan semua serba baru. Namun perilaku kita kembali seperti dulu seiring ramadhan berla-

lu. Kita masih menjadi pribadi yang emosional, individual, dan mengesampingkan nilai moral.

Padaahal, setelah mendapat gembengan iman selama ramadhan idealnya kita menjadi pribadi yang menang. Kemenangan yang terpancar dalam ketenangan, kepedulian, dan perilaku yang mengedepankan etika dan moral. Sehingga, kita pun memiliki kerendahan hati untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain.

Selamat hari raya idul fitri 1442 H, atas nama redaksi majalah Cirebon Katon kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga kualitas taqwa kita meningkat, sehingga dapat berkarya untuk menebar kebaikan dan manfaat.

Salam Cirebon Katon!

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Siska Karina, MH
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Risalah)

Ardiles Afla Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi :

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Nestapa Penganggur, Akankah Tiada Henti?



16 | KILAS

Persiapan Pengesahan Dua Raperda



18 | PUBLIKA

Jembatan Gantung Cisoka Rusak



20 | INSPIRASI

Ache Ruhayat Asmaya:
40 Tahun Tekuni Seni Ukir



22 | LENSA

Rezeki Berlipat Pengrajin Ketupat



24 | PROFIL

Ismiyatul Yusuf
Berguru Hingga ke Negeri Kanguru

28 | DINAMIKA

Catatan Realisasi APBD 2020

30 | Raperda Perumahan dan Permukiman Kumuh Disahkan

32 | DPRD Ketok Palu Raperda Pemdes dan BPD

34 | Mohamad Luthfi:
Perlu Alat Ukur Wujudkan Mimpi RPJMD



36 | POTENSI

Wisata Cikuya
Habitat Murni Kura-Kura Belawa

38 | DESA

Susukan Tonggoh
Kurangi Urban dengan Desa Wisata

Nestapa Penganggur, Akankah Tiada Henti?

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon tak berbanding lurus dengan jumlah lowongan pekerjaan yang ada. Harus bagaimana?



Foto: Foto:Quisoy/ik

Sandi, seorang laki-laki berusia 24 tahun tampak capek dan lesu setelah berkeliling di Kota Cirebon. Ia lalu duduk di warung ketoprak dan memesan makanan. Badannya berkeringat, wajahnya kusam setelah berjam-jam berlang-lang ke banyak tempat guna mencari

lowongan kerja.

Sandi merupakan lulusan sarjana perbankan syariah salah satu kampus di Cirebon yang lulus Oktober 2020 lalu. Usai lulus, ia langsung mengurus berkas lamaran kerja. Tak tanggung-tanggung, lebih dari sepuluh perusahaan pun telah ia kunjungi.

Namun, Sandi tak kunjung pula mendapat panggilan. Ia pun merasakan stres.

“Kalau ada lowongan kerja berkabar saja mas. Kemampuan saya di bidang akuntansi, perbankan dan admin. Saya juga sedikit memliki keahlian di fotografer,” ucapnya, dengan



penuh harap.

Lain halnya dengan Aris (18), Pemuda Desa Setupatok, Mundu, yang dirumahkan dari pekerjaannya di Rest Area setahun yang lalu. Pasca dirumahkan, pemuda yang tak menamatkan bangku SMP ini sebenarnya pernah melamar di salah satu pabrik, namun tak kunjung juga mendapat balasan.

Alhasil, kini Aris masih menganggur. Hari-harinya ia habiskan hanya di rumah. Tak banyak yang Aris lakukan. Sekali ia hanya bermain gawai dan membantu ibu melakukan pekerjaan rumah tangga. Atau pun ia isi dengan bermain bersama teman sejawatnya. Aris mengaku, sering merasa malu karena masih meminta uang kepada orang tua.

“Saya tidak ingin terus merepotkan orang tua. Saya ingin bekerja, tetapi bingung harus kerja apa,” keluh Aris.

Menurut Survei yang diadakan Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 122.145 orang. Pengangguran Terbuka paling

banyak berada pada penduduk yang belum tamat SMA dengan mencapai 67.708 penduduk. Disusul penduduk yang belum tamat SD dengan jumlah 29.879, SMP dengan jumlah 22.801, dan Diploma I/Perguruan Tinggi berada di angka 1.757 jiwa.

Hasil survei yang diadakan BPS Kabupaten Cirebon juga menunjukkan sebanyak 7,35 % penduduk menganggur, 24,42 % mengurus rumah tangga, sementara 56,44 % bekerja, dan lain-lainnya 4,4%.

Menaiknya angka pengangguran pada tahun 2020 pun disadari Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas Disnakertrans Kabupaten Cirebon Sulaeman Tanudi. Hal tersebut, dikarenakan pandemi Covid-19 berdampak berat pada dunia usaha di tanah air. Sehingga membuat sejumlah perusahaan tidak sanggup meneruskan produktivitas usaha hingga lakukan PHK.

“Ada sekitar 200 pekerja yang di PHK di tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19. Jadi menyebabkan angka TPT mengalami peningkatan. Awalnya 10,28 persen. Naik 11,2 kemu-

dian bertambah menjadi 11,52 persen”, terangnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Nana Kenanawati pun merasa geram dengan kondisi tersebut. “Sebelum pandemi Covid-19 saja angka pengangguran di Kabupaten Cirebon sudah tinggi. Ditambah lagi sekarang tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Namun ia juga mengungkapkan, salah satu faktornya juga dikarenakan minimnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan hingga tenaga kerja yang tak handal dan disiplin.

“Oke lah misalnya masyarakat lingkungan setempat meminta bekerja di perusahaan yang berada di lingkungan setempat karena dilindungi Undang-Undang. Tetapi pertanyaannya, ada enggak masyarakat yang 60 % kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri setempat tersebut? Jadi kan enggak terserap,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan Sulaeman, dari data yang Disnakertrans catat berdasarkan pembahasan UMP dan UPL. Pada 2020 misalnya, terdapat estimasi kebutuhan dari 800 perusahaan sejumlah 13.808 lowongan kerja. Namun tidak banyak para pencari kerja (pencaker) yang memiliki skill sesuai kebutuhan perusahaan.

“Ada PT Longrich, Taekwang yang membutuhkan ribuan penjahit. Namun lulusan kita, kebanyakan otomotif, TKJ. Jadi enggak sinkron dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Ini juga peran seluruh dinas harus saling bahu membahu untuk menuntaskan persoalan itu. Saat ini banyak SMK yang telah berdiri tetapi tidak memiliki jurusan yang sebenarnya dibutuhkan banyak perusahaan,” jelasnya.

Sulitnya Perizinan Investor

Selain menyiapkan SDM yang mumpuni. Peluang menanggulangi pengangguran, kata Nana, salah satunya dengan mendatangkan investor agar dapat membuka lowongan pekerjaan. Namun ia mengungkapkan, banyaknya investor yang batal mendirikan perusahaan di Kabupaten Cirebon lantaran sulitnya perizinan di Kabupaten Cirebon. Akhirnya para investor memilih lari.

“Berikan perizinan yang mudah dan lahan yang murah. Tekan juga peran premanisme yang menghambat investasi. Kemudian siapkan tenaga kerja dengan matang,” tegasnya.

Ia juga menyarankan, bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan agar mengikuti aturan yang tertib. Ia berharap masyarakat yang sedang mencari pekerjaan tidak melalui oknum lain, melainkan langsung dengan Disnakertrans.

“Kan sudah ada MoU antara Disnakertrans dengan perusahaan. Kalau ada apa-apa itu tanggung jawabnya Disnakertrans. Karena memang sudah bekerjasama dengan Satpol PP maupun kepolisian,” ungkapnya.

Sementara ini mengenai peringkat pengangguran Kabupaten Cirebon pada 2021, Sulaeman mengungkapkan Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut, lanjutnya, bukan disebabkan terserapnya pengangguran, melainkan karena dampak PHK di daerah lain lebih banyak. Sehingga angka pengangguran di daerah lain naik melewati Kabupaten Cirebon.

“Tahun sekarang hingga Mei, peringkat pengangguran Kabupaten Cirebon berada di urutan ke-7 se Jawa Barat,” ungkapnya.



Sulaeman mengaku, Disnakertrans memiliki target upaya dalam mengurangi pengangguran. Tahun 2021, Disnakertrans memiliki target 11,12. Sementara tahun 2022 mencanangkan pengangguran akan berkurang hingga 10,30 dan tahun selanjutnya 9,90 persen.

Rubah Mindset Pencari Kerja

Namun, dalam rencana mengurangi TPT, kata Sulaeman, tidak dapat hanya dilakukan dengan mengandalkan lowongan pekerjaan dari perusahaan. Dengan jumlah pengangguran 11,52 persen dari jumlah penduduk saat ini, belum berbanding lurus dengan peluang lowongan pekerjaan yang ada.

Sehingga ia pun menilai, perlunya alternatif lain agar tidak mengandalkan lowongan pekerjaan. Namun harus melalui sinkronisasi dengan seluruh dinas dengan melahirkan *enterpreuner* baru misalnya.

Senada juga, Nana mengatakan jumlah pencaker yang begitu banyak tak mungkin hanya mengandalkan perusahaan. Ia pun berpendapat agar pola pikir masyarakat juga dirubah untuk tidak hanya mengandalkan

lowongan pekerjaan. Namun sebaliknya, bagaimana cara membuka lapangan kerja baru.

“Fakta globalisasi membuat persaingan mencari lapangan kerja lebih ketat. Pemuda akan terus mengalami ketertinggalan kalau tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Generasi pemuda jangan memiliki pola pikir untuk bekerja. Tetapi bagaimana menciptakan pekerjaan. Bisa dengan berdagang, berwirausaha *online* dan banyak cara lainnya,” jelasnya.

Ia juga menyarankan kepada para pemuda agar bisa lebih kreatif. Nana mencontohkan, sarjana pertanian idealnya harus bisa membuka lapangan kerja dari ilmu yang dimilikinya. Bisa dengan memanfaatkan lahan yang sebelum tidak produktif menjadi produktif.

“Kalau nanya modalnya dari mana? Kan bisa dengan mengajukan bantuan ke Dinas Pertanian. Jangan malah lulusan pertanian bekerja di bank. Malah ilmu tentang pertaniannya tidak diimplementasikan. Jadi, mari kita sama-sama baik pemerintah dan masyarakat untuk saling bahu-membahu atasi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya. •Muiz

DATA PENCARI KERJA PERKECAMATAN TAHUN 2021

JANUARI

PER KECAMATAN	L	P	JUMLAH
ARJAWINANGUN	24	13	37
ASTANAJAPURA	33	11	44
BABAKAN	37	55	92
BEBER	15	13	28
CILEDUG	29	22	51
CIWARINGIN	30	25	55
DEPOK	23	30	53
DUKUPUNTANG	18	35	53
GEBANG	33	26	59
GEGESIK	15	23	38
GEMPOL	23	49	72
GREGED	6	10	16
GUNUNGGATI	23	41	64
JAMBLANG	17	32	49
KALIWEDI	5	17	22
KAPETAKAN	30	46	76
KARANGSEMBUNG	18	11	29
KARANGWARENG	8	9	17
KEDAWUNG	18	15	33
KLANGENAN	20	37	57
LEMAHABANG	14	19	33
LOSARI	39	21	60
MUNDU	13	16	29
PABEDILAN	34	48	82
PABUARAN	20	23	43
PALIMANAN	32	32	64
PANGENAN	16	15	31
PANGURAGAN	13	18	31
PASALEMAN	4	10	14
PLERED	37	32	69
PLUMBON	39	31	70
SEDONG	9	12	21
SUMBER	34	34	68
SURANENGGALA	24	32	56
SUSUKAN	15	24	39
SUSUKAN LEBAK	8	15	23
TALUN	14	20	34
TENGAH TANI	13	25	38
WALED	11	29	40
WERU	25	40	65
TOTAL	839	1016	1855

FEBRUARI

PER KECAMATAN	L	P	JUMLAH
ARJAWINANGUN	27	30	57
ASTANAJAPURA	19	15	34
BABAKAN	42	70	112
BEBER	14	13	27
CILEDUG	37	24	61
CIWARINGIN	19	37	56
DEPOK	14	26	40
DUKUPUNTANG	20	32	52

GEBANG	31	69	100
GEGESIK	18	21	39
GEMPOL	23	43	66
GREGED	9	2	11
GUNUNGGATI	31	42	73
JAMBLANG	18	31	49
KALIWEDI	7	24	31
KAPETAKAN	27	56	83
KARANGSEMBUNG	22	15	37
KARANGWARENG	13	3	16
KEDAWUNG	13	6	19
KLANGENAN	16	34	50
LEMAHABANG	22	5	27
LOSARI	74	36	110
MUNDU	13	13	26
PABEDILAN	106	98	204
PABUARAN	19	22	41
PALIMANAN	29	45	74
PANGENAN	16	30	46
PANGURAGAN	8	17	25
PASALEMAN	9	13	22
PLERED	23	32	55
PLUMBON	36	35	71
SEDONG	4	3	7
SUMBER	27	35	62
SURANENGGALA	23	37	60
SUSUKAN	17	45	62
SUSUKAN LEBAK	29	7	36
TALUN	18	20	38
TENGAH TANI	13	19	32
WALED	26	11	37
WERU	34	30	64
TOTAL	966	1146	2112

MARET

PER KECAMATAN	L	P	JUMLAH
ARJAWINANGUN	6	14	20
ASTANAJAPURA	8	9	17
BABAKAN	73	64	137
BEBER	0	6	6
CILEDUG	86	31	117
CIWARINGIN	9	19	28
DEPOK	14	20	34
DUKUPUNTANG	15	17	32
GEBANG	56	43	99
GEGESIK	8	16	24
GEMPOL	22	35	57
GREGED	1	6	7
GUNUNGGATI	21	23	44
JAMBLANG	13	16	29
KALIWEDI	2	8	10
KAPETAKAN	10	33	43
KARANGSEMBUNG	5	5	10

KARANGWARENG	3	2	5
KEDAWUNG	12	7	19
KLANGENAN	10	10	20
LEMAHABANG	11	4	15
LOSARI	43	21	64
MUNDU	10	7	17
PABEDILAN	63	43	106
PABUARAN	52	29	81
PALIMANAN	21	20	41
PANGENAN	13	23	36
PANGURAGAN	8	11	19
PASALEMAN	31	14	45
PLERED	17	15	32
PLUMBON	14	26	40
SEDONG	1	2	3
SUMBER	20	26	46
SURANENGALA	28	36	64
SUSUKAN	9	15	24
SUSUKAN LEBAK	3	4	7
TALUN	8	16	24
TENGAH TANI	6	13	19
WALED	50	40	90
WERU	20	18	38
TOTAL	802	767	1569

APRIL

PER KECAMATAN	L	P	JUMLAH
ARJAWINANGUN	14	20	34
ASTANAJAPURA	22	31	53
BABAKAN	102	61	163
BEBER	12	10	22
CILEDUG	77	36	113
CIWARINGIN	17	31	48
DEPOK	21	30	51
DUKUPUNTANG	17	21	38
GEBANG	70	62	132
GEGESIK	17	27	44
GEMPOL	30	36	66
GREGED	7	8	15
GUNUNGJATI	32	50	82
JAMBLANG	19	11	30
KALIWEDI	9	12	21
KAPETAKAN	33	49	82
KARANGSEMBUNG	24	10	34
KARANGWARENG	12	9	21
KEDAWUNG	12	13	25
KLANGENAN	28	29	57
LEMAHABANG	31	5	36
LOSARI	37	43	80
MUNDU	10	18	28
PABEDILAN	929	843	1772
PABUARAN	50	29	79
PALIMANAN	17	39	56
PANGENAN	16	22	38
PANGURAGAN	11	17	28
PASALEMAN	29	19	48
PLERED	35	36	71

PLUMBON	63	52	115
SEDONG	6	18	24
SUMBER	41	22	63
SURANENGALA	17	34	51
SUSUKAN	15	35	50
SUSUKAN LEBAK	13	9	22
TALUN	13	15	28
TENGAH TANI	17	22	39
WALED	36	14	50
WERU	34	37	71
TOTAL	1995	1885	3880

MEI

PER KECAMATAN	L	P	JUMLAH
ARJAWINANGUN	4	2	6
ASTANAJAPURA	2	5	7
BABAKAN	13	14	27
BEBER	2	7	9
CILEDUG	11	12	23
CIWARINGIN	13	9	22
DEPOK	8	32	40
DUKUPUNTANG	4	19	23
GEBANG	12	15	27
GEGESIK	2	2	4
GEMPOL	3	11	14
GREGED	4	1	5
GUNUNGJATI	8	6	14
JAMBLANG	6	13	19
KALIWEDI	3	2	5
KAPETAKAN	3	9	12
KARANGSEMBUNG	3	6	9
KARANGWARENG	3	0	3
KEDAWUNG	1	5	6
KLANGENAN	9	10	19
LEMAHABANG	4	5	9
LOSARI	27	18	45
MUNDU	3	5	8
PABEDILAN	10	13	23
PABUARAN	27	19	46
PALIMANAN	12	22	34
PANGENAN	3	5	8
PANGURAGAN	5	9	14
PASALEMAN	1	2	3
PLERED	4	7	11
PLUMBON	8	30	38
SEDONG	2	6	8
SUMBER	9	14	23
SURANENGALA	9	8	17
SUSUKAN	1	4	5
SUSUKAN LEBAK	7	7	14
TALUN	5	3	8
TENGAH TANI	6	5	11
WALED	3	9	12
WERU	14	8	22
TOTAL	274	379	653

(Sumber data Disnakertrans Kabupaten Cirebon)

Berpacu Membuka Lapangan Kerja

Disnakertrans berupaya optimalkan program BLK. Sementara Dinas UMKM dan Disperdagin kembangkan pelaku usaha agar mampu membuka lapangan kerja baru. Sudah tepatkah?



foto: foto: quany/ik

Peringkat pengangguran di Kabupaten Cirebon menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menempati nomor 7 di Jawa Barat. Rinciannya, BPS menunjukkan sebanyak 7,35 % penduduk Kabupaten Cirebon merupakan pengangguran. Sedangkan sebanyak 24,42 % mengurus rumah tangga, dan 56,44 % bekerja.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans)

Kabupaten Cirebon terus berupaya mengurangi angka pengangguran Kabupaten Cirebon. Langkah konkretnya dengan senantiasa menggelar job fair maupun pelatihan kompetensi melalui program Balai Latihan Kerja (BLK) guna menyiapkan tenaga kerja yang memiliki skill.

Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas Disnakertrans Kabupaten Cirebon Sulaeman Tanudi

mengatakan, Disnakertrans telah bekerjasama dengan banyak perusahaan di Kabupaten Cirebon perihal penempatan tenaga kerja. Informasi bisa diperoleh melalui laman sosial media milik Disnakertrans.

“Ada sekitar 800 hingga 1000 perusahaan mulai dari perusahaan kecil, menengah dan besar di bawah pengawasan kami. Dari 800 perusahaan tersebut pada tahun ini saja misalnya



membutuhkan 13.808. Itu belum perusahaan yang baru berdiri seperti, PT Longrich yang membutuhkan ribuan tenaga kerja juga,” ungkapnya.

Namun Sulaeman mengaku, ada ketidakseimbangan antara pasar kerja dan kebutuhan. Alhasil penyerapan tenaga kerja pun menjadi terbatas. Dari jumlah lowongan kerja yang Disnakertrans catat tentu belum bisa mengcover seluruh jumlah pengangguran yang ada. Selain itu, ada ketidaksinkronan kebutuhan pasar dengan kurikulum alumni sekolah kita.

“Ada PT Taekwang, Longrich yang membutuhkan tenaga kerja skill menjahit. Tetapi kompetensi para pelamar kebanyakan TKJ

atau otomotif. Ini kan jadi tidak terserap. Ada ketidaksinkronan kebutuhan pasar dengan kurikulum sekolah kita. Jadi perlu peran semua dinas untuk sama-sama mengevaluasi,” jelasnya.

Disnakertrans pun bertekad akan mengoptimalkan kompetensi calon tenaga kerja melalui program BLK. Pelaksana BLK Disnakertrans Kabupaten Cirebon Otong Jaja Sumidra, menargetkan akan ada 87 paket pelatihan BLK yang sesuai kebutuhan industri pada 2021. Dalam satu pakatnya diikuti 16 siswa.

“Artinya, akan ada 1.392 siswa yang dilatih keterampilan sesuai pasar dan siap ditempatkan di perusahaan nantinya,” ujar Jaja.

Program BLK yang menjadi ladang garap Disnakertrans ini setidaknya memiliki 13 kejuruan yang bisa dikuiti oleh peserta. Diantaranya teknik manufaktur, teknik las, teknik otomotif, teknik listrik, teknik elektronik, bangunan, teknologi informasi dan komunikasi, garmen apparel, tata kecantikan, processing, desain batik, teknik refrigerasi hingga industri kreatif.

Selain itu, ada pula pelatihan kompetensi yang dilakukan BLK Kabupaten Cirebon dengan mengacu pada potensi daerah. Seperti pengembangan sektor pertanian melalui pelatihan olah makanan.

“Kami bisa membuat pelatihan aneka jenis produk lokal.



Pastinya bisa untuk mendapatkan penghasilan lebih bagi mereka. Tapi tugas kami hanya pada pelatihan kompetensinya, bukan konsep wirausaha. Kalau konsep wirausaha itu bagiannya Dinas lain,” jelasnya.

Siapkan Pelatihan E-Commerce

Sementara itu, Kepala Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Cirebon Muhammad Ferry Afrudin, menargetkan, sebanyak 880 wirausahawan akan mendapatkan pelatihan di tahun ini. Salah satunya pelatihan e-commerce sebagai upaya memberikan ide dan cara pengembangan bisnis ekonomi dan UMKM bagi para pelaku usaha sebagai upaya akselerasi pen-

gurangan pengangguran.

Fery mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas SDM para pelaku UMKM agar dapat menguasai manajemen usaha yang baik. Ia berharap *output* pelatihan ini akan mampu membuka lapangan kerja baru sehingga akan menyerap tenaga kerja.

“Pelatihan ini merupakan salah satu cara bagaimana menciptakan pelaku usaha baru untuk mereka yang terdampak pandemi Covid 19. Seperti korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Disitulah minimal kami bisa memberikan kontribusi mengurangi pengangguran,” paparnya.

Adapun untuk sumber dana pelatihannya, Fery mengatakan,

dari 880 pelatihan tersebut menggunakan dana Pemerintah Provinsi maupun APBD Pemerintah daerah.

Ia pun mengaku, sejak pandemi Covid-19 pelatihan e-commerce ini konsisten dilakukan. Tahun 2020 lalu ada sekitar 543 pelaku usaha diberikan pelatihan. Pembekalan tersebut dilakukan sekali selama tiga hari.

Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon menargetkan sebanyak 370 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dengan berbagai jenis produksi akan mendapatkan pelatihan di tahun 2021. Seperti Industri kerajinan rotan, mebel, bata merah, batu alam, kulit kerang, garam, konveksi, batik tulis, hingga makanan ringan.

“Tahun 2020 lalu ada sekitar 150 pelaku IKM binaan diberikan pelatihan. Tahun ini kami menargetkan ada peningkatan yang signifikan,” kata Teguh Mulyono selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri Disdagin Kabupaten Cirebon.

Para peserta IKM akan mendapatkan pelatihan dengan durasi maksimal tiga hari. Adapun fokus pelatihannya berupa meningkatkan kualitas kemasan produk hingga memenuhi standar penjualan.

Teguh berharap, melalui pelatihan tersebut akan meningkatkan citra, daya jual dan daya saing bagi pelaku IKM. Sehingga, dapat menunjang perekonomian masyarakat hingga terciptanya lapangan kerja baru.

“Moto kita adalah berdaya saing. Caranya menaikkan level produk IKM yang lebih baik, mulai dari kemasan maupun desainnya. Pelatihan ini penting dilakukan untuk menunjang ekonomi rakyat” pungkasnya. •Cak

Ahmad Munajim: Perlu Banyak Wirausahawan Baru

Data BPS mencatat pengangguran di Kabupaten Cirebon nomor 7 se Jawa Barat. Untuk mengetahui penyebab dan solusinya. Reporter Cirebon Katon pun mewawancarai salah satu pengusaha sekaligus akademisi H Ahmad Munajim, MM. Berikut Petikannya:



Foto: foto.com

Bagaimana tanggapan anda mengenai pengangguran di Kabupaten Cirebon?

Menurut saya angka pengangguran di Kabupaten Cirebon cukup tinggi, seharusnya

pemerintah berupaya lebih cepat dalam menangani itu. Apalagi di saat pandemi Covid 19 seperti ini, masyarakat yang terdampak lebih besar. Pasalnya, sekarang hampir semua perusahaan se-

dang diujung tanduk. Upaya yang bisa dilakukan hanya mem-PHK-kan karyawannya. Itu yang membuat pengangguran jadi meningkat dan terjadi di manapun.

Pengangguran memang menjadi salah satu masalah yang serius, karena dampaknya bisa menimbulkan dari berbagai sisi, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Saya kira, pemerintah sudah seharusnya membuka mata dalam melihat realita seperti ini. Lakukan segala hal dalam mengurangi masalah tersebut, karena kalau tidak cepat teratasi dampaknya juga akan semakin melebar.

Mereka yang pernah bersekolah tidak bisa menutup kemungkinan menjadi pengangguran. Kenapa demikian?

Jadi, kita harus bisa membedakan antara *hard skill* dan *soft skill*. Ijazah itu kaitannya dengan *hard skill* dibantu dengan ilmu pengetahuan, sedangkan yang *soft skill* itu kan tentang keterampilan. Misalkan si A nih yang tidak mempunyai ijazah, dia bisa saja mempunyai warung makan yang besar sekali, itu kan masuknya keterampilan. Belum tentu mereka yang lulusan SMK tata boga mampu melakukan itu. Sehingga hal demikian, ukurannya dari jam terbang.

Ini terbukti dari sepengetahuan saya mengenai guru, walaupun mereka sekolah di keguruan sarjana pula. Begitu disuruh ngajar ada yang malah canggung. Tapi ada orang yang ngajar terus belum pernah kuliah, justru pengajarannya sangat baik dan diterima oleh murid. Karena memang mengajar itu kan seni.

Keterampilan yang sedikit itu bisa didorong dengan ilmu pengetahuan, ini kan sangat tidak membutuhkan ijazah. Yang harus didahulukan keterampilan. Nah seharusnya pemerintah bisa menyediakan pelatihan-pelatihan seperti itu, agar



anak suatu saat nanti, bisa lebih mengeksplor dirinya di mana pun. Saya yakin jika pemerintah bisa memfasilitasi, akan sedikit sekali para penganggur.

Sekarang Disperdagin sedang melakukan pelatihan e-commerce. Apakah itu efektif menurut anda?

Kalau berbicara efektif atau tidak, memang kita semua seharusnya sudah menggunakan E-Commerce. Perusahaan E-Commerce seperti Lazada, Shopee dan lainnya bersifat online. Kalau kita bergulat menjadi UMKM justru seharusnya menjadi kewajiban ada pelatihan seperti itu. Jika tidak, kita akan ketinggalan. Apalagi sekarang kebanyakan orang inginnya instan, tidak perlu repot-repot harus keluar. Tinggal klik saja.

Sekarang kita hidup di era digitalisasi, sampai pengguna Facebook pun memiliki *market place*. Bahkan yang lebih bagus lagi disiarkan langsung melalui online, jadi mereka lebih gam-

pang untuk mengenalkan produknya. Apakah itu solusi? Jelas sekali itu solusi. Namun untuk penyelesaian lebih lanjutnya kita memang harus mengkaji lebih dalam.

Karena sekarang sudah peningkatan zaman. Kalau di negara Jepang hal demikian sudah lumrah karena eranya sudah 5.0. Makanya di Jepang, jika kita memesan barang lalu diantarkan melalui pesawat *drone* itu sudah sangat biasa. Tapi di Indonesia kan baru era 4.0, kita baru menggunakan aplikasi seperti Go Jek, Grab dan lain sebagainya.

Saya pikir saat ini pemerintah masih sedikit program yang melatih pembinaan, mereka kalah oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Banyak hal sebetulnya, kalau saja antara eksekutif dan legislatif itu bekerjasama dengan baik dan tupoksinya tidak tumpang tindih. Saya yakin berapapun anggarannya jika itu mengenai kepentingan masyarakat, seharusnya pasti dilakukan.



Artinya baik eksekutif maupun legislatif membuat regulasi yang sekiranya menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus menyediakan itu. Kan peran pemerintah sebagai mediator. Maksud saya UMKM yang ada di daerah Kabupaten Cirebon itu di bina dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

Lalu, menurut anda solusi apa yang tepat untuk mengurangi pengangguran?

Dulu itu pemerintah desa dalam melakukan mengurangi angka pengangguran itu melalui mengikutsertakan pemuda yang belum bekerja, seperti misalnya, kalau di desa sedang ada perbaikan jalan atau membenahi drainase yang rusak. Ia mengerahkan semua anak muda yang belum bekerja untuk menggarapnya. Namun itu hanya sifatnya sementara.

Tidak ada yang sifatnya terus menerus.

Kalau sekarang, menurut saya, jika untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Cirebon tidak ada cara lain selain harus mendorong sektor riil terutama UMKM. Gandeng semua elemen untuk membangun ekonomi kreatif, agar semua masyarakat terlibat dalam membuat produk. Lebih tepatnya menciptakan wirausahawan.

Masyarakat harus diberi peluang dalam membangun jiwa kewirausahaannya, dengan cara mempermudah surat perizinannya, prosesnya jangan dipersulit. Buka juga semua link pemerintah untuk membantu memasarkan produk masyarakat. Agar pasar masyarakat lebih luas jangkauannya. Kebijakan seperti itu yang sekiranya anak-anak di Kabupaten Cirebon bisa lebih memahami tentang manajemen produk. Itu

salah satu cara agar bisa menciptakan wirausahawan baru.

Apa ada contoh di kota lain yang bisa mengurangi pengangguran?

Saya kira kalau berbicara pengangguran, di Indonesia belum ada kota yang bisa mengatasi masalah tersebut secara menyeluruh ya. Karena pengangguran kan masalah yang sangat kompleks. Pemerintah juga dari dulu sudah berupaya dalam menangani itu. Namun sampai sekarang persoalan pengangguran masih tetap ada.

Tapi kalau untuk dijadikan sebagai contoh, seharusnya Cirebon bisa mengaca ke kota-kota besar dan kawasan industri lainnya. Mereka sudah berupaya untuk mengurangi pengangguran, meski hanya beberapa persen saja. Artinya itu sudah bisa mengurangi pengangguran.

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayon	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Persiapan Pengesahan Dua Raperda

Pansus II DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat bersama SatpoL PP dan DPMD mengenai Raperda Ketertiban Umum dan Raperda Pemdes dan BPD.



foto-foto : Qusoy/ik

Paripurna Perubahan RPJMD

DPRD Kabupaten Cirebon menyetujui rencana perubahan RPJMD Bupati Cirebon 2019-2024.



foto-foto : Qusoy/ik

Jembatan Gantung Cisoka Rusak



Assalamu'alaikum wr wb

Kepada anggota dewan yang terhormat, perkenalkan saya Samsudin, warga Desa Kejuden, Kecamatan Depok. Sebelumnya saya mau melaporkan kepada Bapak/Ibu dewan bahwa ada kerusakan infrastruktur di sini. Yaitu jembatan gantung penghubung antar Desa Cempaka Kecamatan Plumbon dan Desa Kejuden Kecamatan Depok. Kondisi jembatan tersebut sangat memprihatinkan,

usianya pun sudah belasan tahun. Sudah sangat tidak layak untuk dilewati. Jembatan gantung di atas Sungai Cisoka ini sebelumnya dibangun sebagai akses alternatif warga kedua desa agar lebih cepat. Untuk itu, saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Cirebon agar merevisi dan memperbaiki jembatan tersebut. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr wb

Samsudin, (26)/Wiraswasta/Kejuden

Keluhan Penyaluran Bantuan Sosial

Assalamu'alaikum wr wb, Bapak/Ibu Dewan yang terhormat.

Saya Sekar (bukan nama sebenarnya), warga Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Saya ingin menyampaikan keluhan kesah mengenai bantuan sosial dampak pandemi Covid 19 yang dikurikan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat di desa.

Masalahnya, ada ketidakmerataan bantuan sosial yang disalurkan melalui pemerintah desa untuk tiap KK. Saya melihat penerima bantuan justru karena kedekatan kekerabatan bukan karena faktor kelayakan. Sementara kami yang tidak memiliki hubungan kekerabatan hingga sekarang belum pernah menjadi penerima bantuan tersebut.

Mohon kiranya Bapak/Ibu Dewan bisa merespon atas permasalahan tersebut untuk kiranya mengaudit agar tidak menjadi kesalahpahaman antar masyarakat. Teri-



makasih Cirebon Katon berkenan menerbitkan.

Wassalamu'alaikum wr wb

Sekar (37) /Ibu Rumah Tangga/Mertapada Wetan

Perlu Fasilitas Arena Badminton

Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD.

Seperti diketahui, Kabupaten Cirebon memiliki banyak klub bulutangkis yang resmi. Semuanya aktif dengan melakukan pendidikan dan latihan untuk pembinaan secara berjenjang. Namun selama ini, kami merasa belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah. Terutama mengenai fasilitas arena bulutangkis. Berbeda dengan sepakbola yang justru menghabiskan ratusan miliar untuk stadionnya.

Untuk itu, saya mengusulkan kepada Bapak/Ibu dewan agar menggagas pula arena badminton hall. Minimalnya cukup untuk 10 lapangan dengan karpet standar nasional. Saat ini bibit atlet badminton berprestasi di Kabupaten Cirebon sangat banyak. Jangan sampai beberapa tahun kedepan ketika mereka mencapai prestasi emas, yang dibawa malah nama daerah lain. Kejadian itu banyak terjadi karena para pemandu bakat menawari



pindah domisili. Akankah aset berprestasi Kabupaten Cirebon akan lari karena minimnya fasilitas mereka? Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr Wb

Sonny(30)/Pelatih Bulutangkis/Beber

Pencemaran Limbah Batu Alam



Assalamu'alaikum Wr Wb

Bapak/Ibu Dewan yang saya hormati. Saya Ismaya (23) dari Jamblang. Saya ingin mengeluhkan mengenai limbah batu alam di Sungai Jamblang. Pasalnya pencemaran ini berdampak buruk pada masyarakat di sekitar aliran sungai. Masyarakat kerap terganggu akibat pencemaran sungai yang berlangsung lama. Pencemaran sungai diperparah dengan sampah yang turut terbawa aliran sungai. Masyarakat kerap mengeluhkan bau sampah yang dihasilkan.

Selain masalah bau yang menyengat, Sungai Jamblang yang tercemar juga menyimpan ancaman lain. Limbah batu alam yang berupa residu, mengendap di dasar sungai. Selain mengubah warna air sungai menjadi seperti semen, limbah tersebut membuat sungai menjadi lebih dangkal. Pendangkalan sungai akibat limbah ini berpotensi menimbulkan banjir. Mohon perhatiannya Bapak dan Ibu Dewan terhormat.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Ache Ruhiyat Asmaya: 40 Tahun Tekuni Seni Ukir

Di usianya yang ke 62 tahun, ia tetap komitmen mengabdikan hidupnya menekuni seni ukir. Bagaimana kisahnya?



Foto: foto : Quasy/ik

Tak lagi muda, tangan rentanya memegang sebuah pisau *cutter* yang sudah sedikit berkarat. Tampak dari dekat, telapak tangannya dipenuhi luka sayatan pisau. Matanya tak beralih fokus pada benda yang sedang ia pangku. Sambil menyilangkan kaki, pria berkacamata itu terlihat sangat berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya.

Ache Ruhiyat Asmaya, warga Desa Kubang, Talun, Kabupaten Cirebon ini merupakan seorang pengrajin ukir yang tak banyak dikenal masyarakat sekitar. Di teras rumahnya, terpampang beberapa karya yang telah ia buat. Dari ukir helm, bambu hingga sabuk.

Jiwa seni Ache tumbuh sejak masih muda, semula ia menjadi seorang pelukis, pengukir dan komikus. Tahun 2001, ia pun mendapat sebuah kerjaan mengukir dari salah satu perusahaan batu bara untuk menyambut orang terpenting di Indonesia.

"Saya pernah menggarap sebuah ukir helm demi menyambut Megawati, gambarnya aneka ragam seperti penggalian batu bara hingga bulldoser. Jadi begitu Megawati ke Sumatera, helm harus sudah selesai," terangnya.

Selain helm, ia juga mengukir bambu dan sabuk dari bahan alumunium. Tangannya begitu terampil jika sudah memegang barang tersebut. Menurutnya, semua barang bisa bernilai estetik jika diolah.

Pada tahun 2005, ia memutuskan untuk pensiun lebih dini dari dunia ukir di tambang batu bara. Ia pun memilih untuk fokus menggarap seni ukirannya di rumah.

Untuk harga ukiran yang ia buat pun beragam. Tergantung jenis bahan, tak sampai merogoh kocek begitu besar untuk jenis bambu.

"Kalau untuk ukir bambu yang ukuran 20 cm harganya hanya Rp 25 ribu, paling mahal Rp 50 ribu.

Tapi kalau untuk jenis helm, Rp 200 hingga Rp 250 ribu. Kalau helm bawa sendiri ongkos ukirnya hanya 100 ribu," jelasnya.

Ache menjajahkan hasil olah tangannya dengan memanfaatkan relasi pertemanan dari club motor sampai teman bekerja saat menjadi kuli di tambang batu bara dulu. Ia mengaku telah mengirimkan hasil ukirannya ke berbagai daerah. Dari Bandung, Lampung hingga Palembang.

Ache atau orang biasa menyapanya dengan julukan 'Kemle' ini, semasa muda pernah menjadi anggota club motor di Bandung, ia sudah melakukan lelana brata sampai luar Jawa.

"Usia 23 tahun, saya sudah gabung dengan Bandung Riders Community (BRC), hampir 15 tahun saya hidup menjadi anggota club motor. Sudah *touring* ke Madura, Kalimantan sampai Danau Toba," ungkapnya.

Dalam konsep pembuatan ukiran, ia pun menyerahkan ke konsumennya. "Kalau dulu saya harus gambar manual dulu tapi sekarang lebih mudah, tinggal cari di google terus print. Kalau di sini saya biasa menggarap kaligrafi untuk masjid. Kalau dari masyarakat sini yang beli sehari paling 3 sampai 4 ukiran saja," ujarnya.

Proses pengerjaannya juga tak memakan waktu lama. Dalam sehari, Ache mampu menggarap 2 sampai 3 ukiran. Karena alat yang digunakan hanya menggunakan *cutter*. "Kalau pakai pahat justru membuat proses lebih lama," jelasnya.

Saat ini, Ache mengeluh di usianya sekarang karena ketidakmampuan memanfaatkannya melalui *online*.

"Padahal kalau saya jual melalui *online*, bisa menjadi menambah pundi-pundi rupiah.



Awalnya pernah diajarkan oleh anak, tapi saya tetap tidak paham. Sekarang anak saya sudah pada nikah, mereka sudah punya keluarga sendiri. Jadi sekarang mengandalkan teman saja," keluhnya.

Ia juga membuka lebar kepada siapapun yang ingin belajar mengukir, di rumahnya semua sudah tersedia. Para pengunjung yang ingin belajar cukup membawa pisau sebagai alatnya.

"Saya sangat senang jika ada yang ingin belajar, itu salah satu harapan saya sih, biar ada penerus untuk melakukan seni

mengukir seperti ini," tuturnya.

Di usianya yang ke 62, Ache tak ada niat untuk berhenti berkarya. Dunia perukiran sudah menjadi saksi baginya sampai sekarang. Ia pun masih mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ia memegang prinsip akan terus berkarya hingga akhir hayatnya.

"Saat menjadi anggota club motor, saya sudah mengalami getirnya kehidupan. Dan sekarang hanya ini yang bisa saya lakukan, agar kelak ketika saya meninggal nanti tak meninggalkan belang yang begitu besar," kata Ache. •lan

Rezeki Berlipat Pengrajin Ketupat

Hari Raya Idul Fitri memberikan banyak keberkahan bagi para pengrajin Ketupat. Salah satunya Sangid dan Solika, pasangan suami istri ini, kerap kali kebanjiran pesanan cangkang ketupat.

Ketika hari raya tiba, dalam sehari Sangid dan keluarganya bisa membuat 200 hingga 500 cangkang ketupat dalam sehari.

"Untuk satu cangkang harganya Rp 1000 rupiah. Kalau lagi rame begini, sehari bisa Rp 200 sampai Rp 500 ribu. Pembeli juga beragam, ada yang beli 25, 40 maupun 50 biji," ujar Solika.

Selain hari lebaran, mereka juga sering kebanjiran pesanan untuk tradisi 4 bulan masyarakat. •Soy



Ismiyatul Fatihyah Yusuf Berguru Hingga ke Negeri Kanguru

Sosok perempuan satu ini pernah tinggal lama di Australia. Ia juga memiliki hobi memasak. Bagaimana kisahnya?

Jika ada orang yang puas karena hidup, maka ia seperti binatang dalam sangkar. Hal itu merupakan sebuah petuah seseorang agar terus berproses dengan tidak berhenti.

"Hidup itu untuk belajar," jelas perempuan berkacamata satu ini, saat ditanya mengenai prinsip hidup.



Pasalnya sedari kecil hingga kini menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon, ia selalu menganggap segala permasalahan merupakan sebuah pembelajaran untuk kehidupan ke depan.

Pemilik nama lengkap Ismiyatul Fatihyah Yusuf, B Com, MPA ini, merupakan wanita kelahiran Cirebon tahun 1986. Ia dididik oleh orang tua yang sangat mengedepankan pendidikan dan agama. Terbukti saat SMA saja, ia langsung ditatar di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Tangerang.

Tepat tahun 2005, Ismi pun lulus. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya dengan berkeliling dan tinggal di Australia hingga S2. Semenjak di Australia, Ismi mengikuti banyak berbagai pelatihan seperti memasak. Ia belajar masak apapun, dari masakan lokal hingga internasional.

"Jadi setelah lulus S1, saya langsung ikut sekolah masak. Sebenarnya program *chef* itu 2 tahun namun baru 6 bulan berjalan saya disuruh orangtua pulang ke Indonesia untuk menikah. Sehabis menikah saya langsung melanjutkan S2. Jadi hobi masak sedari kecil itu saya alihkan dengan sering membaca buku," tuturnya.

Tak ada saudara, tak ada teman. Hanya berbekal kemandirian selama hidup di Australia membuat Ismi semakin terpacu dan semangat dalam menjalani kehidupan. Berbagai pengalaman pun pernah ia lakoni. Ia mengalami beberapa momen yang hingga sekarang membekas di benaknya. Yakni, bekeanan pandangan masyarakat Australia mengenai perempuan muslim yang berjilbab.

"Saya pernah dilempar telur 2 kali gara-gara memakai jilbab dan juga dimarahi sama nenek-nenek di bus. Mungkin ia melihat raut muka saya orang Indonesia. Saya enggak sakit hati, karena memang waktu itu bersamaan dengan kasus bom bali yang dilakukan oleh kelompok teroris berkedok Islam. Jadi saya beranggapan, kalau nenek tersebut mengalami Islamofobia," kenangnya.

Tak hanya itu, dampak Islamofobia juga dirasakan saat mencari kerja. Ismi merasa kesulitan pasca meletusnya kasus bom bali. Sebagian masyarakat atau perusahaan di Australia memandang seorang muslim sebelah mata. Untungnya hal itu tak berlangsung lama. Setelah beberapa waktu, Ismi pun dapat diterima di salah satu perusahaan.

"Awalnya memang susah, namun saya terus mencoba dan alhamdulillah bisa diterima oleh perusahaan. Karena ada orang yang dibenaknya kesal sama muslim sebab kejadian itu. Kita tidak bisa mengubah itu, yang harus kita ubah adalah sikap dan perlakuan kita. Intinya kita harus selalu baik



Foto: @usy/Id

kepada siapapun," tuturnya.

Tinggal selama 10 tahun di Australia, Ismi sempat berkeinginan untuk tidak kembali ke Indonesia. Ia sudah mengantongi kualifikasi untuk tinggal dengan bekerja dan mempunyai hak yang sama. Namun di tengah jalan, ia dijemput oleh orang tuanya agar pulang ke Indonesia.

"Waktu itu keputusan orang tua tidak bisa diganggu gugat. Tahun 2015 akhirnya saya balik ke Indonesia," ungkapnya.

Setelah Ismi pulang ke Indonesia, ia sempat merasa bingung harus melakukan apa. Satu-satunya yang bisa dilakukan hanya ikut membantu suami menjalani bisnis properti. Hingga pada 2019, ia ditawarkan agar bersedia maju menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKB untuk memenuhi kuota perempuan.

Awalnya Ismi tak memiliki pandangan sedikitpun untuk terjun dalam kontestasi politik karena tak ada pengalaman. Namun berkat dukungan dari masyarakat dan keluarga begitu banyak, akhirnya ia memutuskan untuk maju. Kala itu ia mengaku akan setotalitas mungkin dalam membantu masyarakat terutama dalam memperjuangkan hak perempuan.

"Dengan saya maju, bagi saya salah satu cara saya agar bisa mengabdikan kepada masyarakat. Apalagi *basic* saya juga sosial. Dengan masuk ke dalam sistem, saya akan terus membantu masyarakat dengan cara mengawal terus kebijakan agar berpihak kepada masyarakat. Jadi saya bismillah aja dan alhamdulillah jadi," pungkas Ismi. •lan

Heri Yanto: Asah Kekompakan dengan Mendaki Gunung

Miliki jiwa sosial tinggi. Sosok satu ini juga hobi mendaki gunung hingga sekarang. Apa motivasinya?



Hutan adalah salah satu tempat yang seringkali ia pijaki. Sosok pria satu ini, tiap tahunnya memilih untuk mendaki gunung sebagai pengisi agenda liburan. Ia memang dikenal sebagai pendaki gunung yang pemberani. Terbukti, puluhan ancala sudah ia taklukkan. Salah satunya adalah Gunung Semeru yang berlokasi di Jawa Timur.

Bukan hanya sekedar hobi, pria bernama lengkap Heri Yanto ini memang sangat menyukai suasana alam sebagai sarana introspeksi diri. Melalui tadabur alam, banyak hal yang bisa ia syukuri ketika sedang berada

di sekeliling hutan. Selain itu, ia juga mendapat berbagai pelajaran ketika dalam perjalanan mendaki bersama kawan-kawannya.

"Kalau kita mau melihat karakter seseorang, di situlah tempatnya. Mendaki gunung itu kegiatan kerjasama dan kekompakan. Ketika jenis orang yang hanya ingin menang sendiri akan ketahuan," tuturnya.

Hobinya mendaki gunung, ternyata telah Heri lakoni sejak masih duduk di bangku SMP. Sambil mengenang, Heri bercerita, dulu ia selalu dibuatkan bekal berupa nasi timbel oleh ibunya tiap kali akan melakukan perjalanan ke puncak.

"Sungguh kenangan masa remaja yang begitu manis," kenangnya.

Selain dikenal sebagai pecinta alam, Heri yang saat ini menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Demokrat juga merupakan sosok dengan jiwa sosial yang tinggi. Kesahihannya, ia pun sering terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di desa maupun kecamatan.

Jejak kiprahnya, dapat dilihat dalam treknya. Heri pernah menjabat sebagai ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sumber selama 12 tahun. Selain itu, sosoknya yang hangat, peduli dan dekat dengan



fotodok/pribadi Heri Yanto

kalangan anak muda, menjadi penyebab ia juga pernah menjabat sebagai ketua karang taruna.

Berekal itu, maka tak aneh, Heri pun hafal dengan realita keadaan masyarakat. Ia acapkali bergumul dan berdiskusi dengan seluruh lapisan warga. Sehingga apapun yang berhubungan dengan hak-hak mereka, Heri bertekad memperjuangkannya.

Ketertarikannya dalam dunia politik berawal dari keprihatinannya melihat kondisi persoalan sosial masyarakat yang tak terlayani. Saat itu, di tahun 2014, Heri kembali dipercaya oleh Camat Sumber untuk menjabat sebagai ketua rumah tidak layak huni (Rutilahu) Kecamatan Sumber.

Hingga suatu waktu di siang hari, selepas Heri mendampingi

pelaksanaan program rutilahu salah satu warga. Ia dikejutkan dengan ucapan warga lainnya.

"Ada yang bilang ke saya 'mas matae buta tah? Coba lihat rumah yang mas beresin sama rumah kita, mana yang lebih layak untuk dibenahi?'," kata Heri, menceritakan.

Sontak ia menoleh ke arah yang ditunjukkan warga tersebut. Bukannya marah karena telah dicaci, justru dalam batinnya, ia juga membenarkan apa yang dinyatakan oleh warga itu. Heri menilai, ada rumah yang memang lebih layak untuk dibenahi daripada yang terdata.

Melihat ketimpangan kebijakan data rutilahu, ternyata menggugah Heri untuk menjadi seorang legislator sebagaimana perannya mengawasi kinerja

dan kebijakan pemerintah. Bermodalkan kalimat 'Lillahi ta'ala' dan restu kedua orangtuanya, akhirnya ia berhasil melangkahkan kaki di jalur politik tersebut.

"Sampai sekarang pun masih merasa miris sekali jika ada masyarakat yang tak terlayani masalah sosialnya. Makanya kalau sekarang saya selalu utamakan data. Kalau tidak ada data, lalu apa yang akan dibicarakan," tandasnya.

Dari pengalamannya menjadi pendamping rutilahu, ia pun mempelajari banyak hal. Baik persoalan data, maupun hakikat dari program rutilahu. Ia memaknai rutilahu sebagai aktivitas kegotongroyongan. Bagaimana tidak, dengan adanya rutilahu, masyarakat seharusnya berbondong-bondong dalam membantu warga yang rumahnya sedang diperbaiki.

Namun fakta yang ia lihat di lapangan, budaya gotong royong masyarakat secara perlahan telah memudar.

Sebagai seseorang yang memiliki jiwa sosial tinggi, Heri kembali menceritakan, banyak masyarakat yang jiwa sosial dan bergaulnya kurang. Mereka tidak pernah hadir dalam momen gotong-royong atau pertemuan masyarakat. Lebih tepatnya, masyarakat saling acuh tak acuh.

Padahal bagi Heru, seharusnya rutilahu bukan hanya sekadar ajang pembenahan rumah warga. Namun juga di sekelilingnya. Kekompakan masyarakat juga harus dibenahi dan diperkuat. Artinya untuk membangkitkan kembali semangat kegotongroyongan antar warga.

"Begitulah kendala saya ketika itu, tetapi bagaimanapun juga peran saya sebagai aktivis masyarakat harus dijalankan. Dimanapun itu saya akan bantu warga agar muncul jiwa sosialnya," pungkasnya. •Sar

Catatan Realisasi APBD 2020

Tujuh fraksi memberi catatan, masukan dan saran dalam laporan penggunaan APBD 2020 kepada Bupati Cirebon.



Pagi itu ruangan paripurna dipenuhi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka mengadakan rapat paripurna untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Cirebon dalam pelaksanaan APBD tahun 2020. Rapat paripurna pun dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana.

Pada rapat paripurna tersebut, ketujuh Fraksi DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan pandangannya, yang berisi apresiasi, saran dan kritik, atas kinerja kepala daerah serta jajaran eksekutif lainnya terhadap pelaksanaan APBD tahun lalu.

Pertama, Fraksi PKB yang

menyampaikan apresiasi pemda terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menaik. Namun, Fraksi PKB mengimbau perlunya penguatan strategi khusus agar pendapatan dan pengelolaan kekayaan daerah bisa lebih optimal.

Selain itu, pentingnya penguatan kapasitas SDM pegawai di lingkungan pemda, Fraksi PKB mengimbau pemda agar lebih serius dalam menyikapi manajemen ASN yang profesional. Sebagaimana amanat UU no 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

"Hampir 60 persen APBD kita tersedot oleh belanja pegawai, kami ingin anggaran terse-

but memiliki kontribusi linier dalam penguatan kapasitas SDM pegawai. Baik kualitas kinerja maupun kemampuan inovasinya," jelas anggota DPRD Fraksi PKB Ismiyatul Fatihyah.

Kedua, giliran Fraksi PDIP yang juga mengapresiasi pemda Kabupaten Cirebon setelah prestasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terbaik dari BPK selama enam kali sejak tahun 2015. Serta anggaran pendapatan dan belanja selama tahun 2020 yang stabil, dan terdapat silpa.

Fraksi PDIP pun, mengimbau agar silpa tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat darurat. Karena, program infrastruktur yang



bersifat darurat ini jika tidak direalisasikan segera akan berpengaruh terhadap aspek-aspek penting, seperti ekonomi, sosial dan Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas).

Ketiga, Fraksi Golkar yang menyebutkan tiga poin agar diperhatikan pemda dalam pelaksanaan APBD. Diantaranya: program dan anggaran harus sesuai dengan perencanaan, pemda harus mengindahkan komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif juga kejelasan batas daerah kabupaten dengan Kota Cirebon yang masih belum ada respon.

Keempat, Fraksi Gerindra meminta berbagai capaian prestasi yang telah didapat Pemda Kabupaten Cirebon agar

menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat. Sehingga bisa lebih mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan berkeadilan.

Mereka juga mempersoalkan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan Covid 19. Sebagaimana anggaran penanganan dampak ekonomi senilai Rp 33 miliar, namun realisasinya hanya Rp 7 milyar. Juga pada penyediaan jaringan pengaman sosial senilai Rp 64 miliar, sementara serapannya Rp 29 miliar.

Kelima, Fraksi Nasdem mengimbau Pemda Kabupaten Cirebon agar memperbaiki kinerjanya baik dalam perencanaan, implementasi pendapatan dan penggunaan belanja daerah.

Berdasarkan dari ukuran dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Peningkatan kepekaan diri dalam memprioritaskan realisasi program kerja juga harus diprioritaskan di masing-masing SKPD sesuai kebutuhan masyarakat. Fraksi Partai Nasdem juga mendorong pemda agar melakukan evaluasi personil SDM secara ketat dengan mempertimbangkan profesionalisme.

Selain itu, pentingnya pemetaan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pendapatan baru. Seperti, peningkatan investasi di bidang industri kreatif dan kepariwisataan desa, maupun penataan kawasan kumuh menjadi zona bisnis terpadu.

"Upaya itu semua, bisa dilakukan dengan mengalokasikan dana stimulus melalui sisa anggaran, sehingga akselerasi pemulihan ekonomi atas dampak pandemi segera dilakukan dengan tepat sasaran. Dengan catatan, tetap mengacu pada skala prioritas bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat," terang Titi Sumanti, anggota DPRD Fraksi Nasdem.

Berbeda halnya dengan Fraksi PKS, mereka menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum mampu memberikan sumbangan signifikan pada PAD. Sehingga, pemda dinilai belum optimal dan kreatif dalam mengelola BUMD yang ada.

Terakhir, Fraksi Demokrat pun memberikan catatan agar Pemda Kabupaten Cirebon mendahulukan pemenuhan hak dasar masyarakat, dengan tetap semangat yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan agar langsung dirasakan oleh masyarakat. •Sar

Raperda Perumahan dan Permukiman Kumuh Disahkan

Sepakat tingkatkan kualitas perumahan dan permukiman. Raperda Perumahan Kumuh pun disahkan dengan catatan perubahan. Bagaimana isinya?



Foto: Foto: Quoy/dk

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini dilakukan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Dalam rapat tersebut, hadir Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiyana, Teguh Rusiana Merdeka dan Subhan. Hadir juga Bupati

Cirebon Imron Rosyadi.

Rapat dipimpin oleh Rudiyana. Ia bertanya kepada para anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang hadir, perihal apakah raperda ini dapat disetujui. Selanjutnya, semua anggota Dewan menjawabnya setuju. Lalu Rudiyana melanjutkan dengan mengetuk palu sebagai tanda pengesahan. Dengan disahkannya menjadi Perda, maka regulasi ini akan dimulai.

Raperda tersebut dibawah garapan tim Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Cirebon. Setelah pengkajian dan penyempurnaan terhadap Ra-

perda tersebut, Pansus III memberikan beberapa konsideran pasal-pasal yang mengalami perubahan. Diantaranya pasal 74 diubah menjadi:

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman. (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang ataupun orang.

(3) Setiap pejabat dilarang



mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan Pemanfaatan ruang.

Selain itu, pasal 79 juga diubah: (1) Setiap perorangan atau badan hukum yang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan IMB atau PBG, pencabutan IMB atau PBG dan pembongkaran bangunan.

(2) Setiap orang perorangan atau badan hukum yang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang ber-

potensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan IMB atau PBG, pencabutan IMB atau PBG dan pembongkaran bangunan.

(3) Setiap orang perorangan atau badan hukum yang melakukan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan bangunan, pencabutan insentif, denda administratif paling banyak Lima Puluh Juta rupiah, dan pembongkaran bangunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Selanjutnya pasal 81 mengalami perubahan yang isinya, setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya pasal 82, mengalami perubahan yang isinya: Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah menyetujui dan mengesahkan menjadi Perda, Kordinator Pansus III Teguh Rusiana Merdeka melalui juru bicara Nova pun memberikan saran kepada Pimpinan Eksekutif. Pertama, Perda tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang bersifat baku dalam penataan kawasan kumuh yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

"Khususnya penataan desa-desa yang termasuk dalam keputusan Bupati Cirebon tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon," ujar Nova.

Kedua, diharapkan Pemerintah Daerah sesegera mungkin menyusun Peraturan Bupati (Perbup). Tujuannya untuk pelaksanaan Perda sebagaimana yang sudah diamanatkan. •Muiz

DPRD Ketok Palu Raperda Pemdes dan BPD

Setelah Pansus II memberi catatan, perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2015 pun disahkan. Seperti apa?



foto: foto: qusy/dk

Pemilihan kuwu (Pilwu) serentak di Kabupaten Cirebon akan digelar pada 2021 ini. Untuk itu, DPRD Kabupaten Cirebon berscepat menuntaskan payung hukumnya. Melalui Panitia Khusus (Pansus) II yang ditugaskan menggarap rancangan peraturan daerah (raperda) atas perubahan kedua Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD.

Pansus II pun, menyampaikan laporannya terhadap raperda setelah selesai membahas, menyempurnakan serta mengkaji melalui aspek yuridis konstitusional mencakup substansi materi, filosofis dan so-

siologis pada rapat paripurna. Sebagaimana tertuang dalam keputusan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2020 atas Propemperda.

Tim raperda, mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan raperda oleh Pansus II. Setelah menerima masukan, saran, menganalisis, melakukan perbandingan daerah lain, akhirnya dapat disetujui dalam rapat paripurna mengenai perubahan kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2015.

“Setelah kita membahas dan hasilnya mengenai raperda Nomor 2 Tahun 2015. Diantaranya: judul raperda tidak mengalami

perubahan, konsideran memang tidak mengalami perubahan, konsideran mengingat tidak mengalami penambahan. Sementara, ketentuan pasal-perpasal mengalami perubahan,” ujar Khanafi, Sekretaris Pansus II dalam rapat.

Perubahan pasal-perpasal dalam raperda Nomor 2 Tahun 2015 pertama, mengenai ketentuan pasal 2 yang ditambahkan ayat 9 dan 10 yang isinya: (9) Pelaksanaan tahapan pemilihan kuwu saat terjadi bencana alam dan/atau non alam dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, ayat (10) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan



pemilihan kuwu saat terjadi bencana alam dan/atau non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Selain itu ada perubahan ketentuan pasal 7 ayat 2 yang diubah, dan ayat 3,4,5, 6 dihapus. Sehingga pasal 7 berbunyi:

(1) Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kuwu, Bupati membentuk:

- a. Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu
- b. Tim Pengawas Tingkat Kabupaten
- c. Tim Pengawas Tingkat Kecamatan dan
- d. Tim Pengaman Pemilihan

Kuwu

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Kemudian untuk pasal 30 diubah dan pasal 31 dihapus. Sementara pasal 34 ada penambahan ayat (3a) yang berbunyi: (3a) Pemungutan suara pada pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 9 tanpa dihadiri oleh calon.

Ketentuan pasal 54 ayat 2 huruf (b) dan (g) diubah sehingga berbunyi:

(b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan kare-

na menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaanya.

(g) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terakhir, ketentuan pasal 84 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi: e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga pembahasan dan penyempurnaan raperda Nomor 2 Tahun 2015 Pansus II menyatakan setuju dan dapat disahkan menjadi Perda.

Pansus II berharap, dengan disahkannya perubahan kedua Perda Nomor 2 Tahun 2015 akan dapat terlaksananya pemerintahan desa yang baik dalam tugas dan wewenang dan menjadi payung hukum yang bersifat baku. Mereka juga berharap, Pemerintah Kabupaten Cirebon sesegera mungkin menyusun peraturan bupati dan peraturan pelaksana lainnya sebagaimana sudah diamanatkan dalam perda.

Adapun satu perda lainnya, yang menjadi garapan Pansus II masih perlu pengkajian dan pembahasan yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian, masukan dari berbagai aspek yuridis serta perlunya kesiapan yang lebih matang.

Dalam rapat paripurna ini, dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Cirebon dan seluruh anggota Pansus. •Suf

Mohamad Luthfi: Perlu Alat Ukur Wujudkan Mimpi RPJMD

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon memberi arahan pentingnya alat ukur isu strategis dalam perubahan RPJMD.



Foto: Foto: Qusoy/ik

Pasca disahkannya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 pada Mei lalu, Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bertempat di Hotel Patra, Kedawung. Hadir saat kegiatan ketua DPRD, Wakil Bupati Cirebon, Sekretaris Daerah, Sekretaris Bapelitbangda dan OPD.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menyampaikan, perlunya memaknai perubahan RPJMD sebagai metamorfosis mimpi bersama tentang masa depan Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, beberapa isu strategis dalam dokumen perubahan RPJMD seperti pengangguran, kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, pembangunan desa dan pengembangan infrastruktur wilayah penting memiliki turunan yang utuh maupun strategi yang tepat.

"Target sasaranannya misalkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang lebih merata. Kemudian sasaran strategisnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Adapun indikatornya PDRB sektor pertanian meningkat, PDRB industri olahan meningkat, PDRB perdagangan meningkat," katanya.

Luthfi menyadari, Kabupaten Cirebon masih jauh tertinggal dengan daerah lain. Contohnya dalam PDRB perkapita, Kabupaten Cirebon hanya mampu menghasilkan Rp 22 juta pertahun, sedangkan Surabaya Rp 132 juta pertahun dan Kota Bandung Rp 80 juta pertahun.

Untuk itu, ia mengingatkan, perlunya akselerasi dalam pembangunan yang menjadi sasaran RPJMD. Seperti, pembangunan waduk misalnya. Hal ini penting untuk mengatasi masalah krisis air yang sering dirasakan masyarakat Kabupaten Cirebon.

"Saya sering berdiskusi dengan stakeholder tentang kondisi



si Cirebon timur. Masalahnya satu. Soal air. Lahan pertanian hanya satu kali panen. Tahun 2007 sudah dibuat kajiannya tentang waduk Cipanundang, namun sampai hari ini hanya menjadi kajian," ujarnya.

Ia juga menyinggung, pentingnya produksi pertanian di Kabupaten Cirebon beralih menggunakan mesin teknologi. Tujuannya agar biaya produksinya lebih murah dan hasil panennya melimpah. Sehingga, mampu bersaing dengan daerah bahkan negara lain.

"Sekarang bagaimana ceritanya kita bisa bersaing dengan Vietnam yang biaya produksi

gabah hanya Rp 2.700 rupiah, sementara kita Rp 4 ribu rupiah. Kapan kita bisa bersaingnya?," tanya Luthfi.

Ia pun mengungkapkan, kondisi ekonomi dunia saat ini yang menuntut pertanian mampu lebih produktif. Karena itu, jangan sampai Kabupaten Cirebon yang memiliki daerah agraris, namun produktifitas pertaniannya turun karena biaya produksi mahal.

"Hari ini revolusi industri telah mencapai 4.0, kalau kita berbicara produktifitas pertanian, boleh dong kita memakai revolusi industri 1.0 dulu. Mengganti tangan manusia menjadi mesin.

Kalau produktifitas pertaniannya turun dan biaya produksinya mahal, kita tidak akan pernah bisa bersaing," ungkapnya.

Sekalipun ia memahami, jika penggunaan mesin di sektor pertanian akan berdampak pada tersingkirnya jumlah tenaga kerja pertanian. Sehingga solusinya, pemerintah Kabupaten Cirebon harus menciptakan banyak lapangan kerja di ruang yang lain.

Selain itu, kata Luthfi, dalam merencanakan perubahan RPJMD, tak kalah penting suatu alat ukur. Sebab alat ukur, akan sangat berarti untuk mengetahui sudah sampai dimana dan bagaimana mencapainya.

"Contohnya, meningkatnya PDRB di sektor pertanian, itu dari berapa menjadi berapa? Ini harus ada di RPJMD. Hari ini PDRB pertanian kurang lebih di angka 20%. Perdagangan 19%. Kita mau tingkatkan menjadi berapa?," terangnya.

Sehingga tak kalah penting peran yang jelas dalam pembagian tugas OPD dalam RPJMD.

"Misalnya, yang bertanggung jawab adalah OPD Perdagangan dan OPD UMKM yang diback-up oleh OPD tenaga kerja. Maka harus segera dibuat TOR nya. Kita perlu tekniskan ini. Kalau ini TOR nya tidak dibuat, yang terjadi akan ada ego sektoral," paparnya.

Ia meyakini, mimpi bersama tentang masa depan Kabupaten Cirebon dalam perubahan RPJMD bisa menjadi kenyataan. Prinsipnya hanya satu, yakni tekad.

"Membangun tekad menjadi kunci utama. Isu strategis harus bisa dijawab dengan tidak hanya sebuah dokumen, melainkan juga diejawantahkan kedalam pembangunan di Kabupaten Cirebon," pungkasnya. •Soy/Muiz

Wisata Cikuya

Habitat Murni Kura-Kura Belawa

Kura-kura belawa pernah hampir punah akibat kematian masal. Kini para warga pun berduyun melestarikannya.



Foto: foto: Quasy/ik

Tim peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyatakan Kabupaten Cirebon memiliki satwa khas berjenis langka. Hewan dengan nama latin *Amyda cartilaginea* itu merupakan sejenis kura-kura air tawar, yaitu labi-labi atau bulus. Keberadaannya yang langka membuat ia banyak diburu kolektor hewan.

Namun siapa sangka, hewan yang dikategorikan langka tersebut bisa dengan mudah ditemui di Kabupaten Cirebon. Tepatnya di Blok Cikuya, Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang yang memiliki sebuah objek wisata penangkaran kura-kura.

Entah bagaimana mulanya, tidak ada yang mengetahui dari

mana hewan bertempurung itu berasal. Hanya saja, menurut cerita turun temurun, Desa Belawa merupakan habitat asli hewan tersebut. Sehingga, ia pun dikenal dengan sebutan kura-kura belawa.

"Kura-kura belawa ini adalah warisan orang tua kami, sejak kapan dan dari mana asalnya tidak ada yang tahu. Setiap bertanya kepada orang tua, mereka selalu menjawab sudah ada sejak dulu," terang Dadan, Kepala Seksi Konservasi Kura Belawa.

Dengan membawa visi penyelamatan dan membudidayakan kura-kura belawa, masyarakat setempat setuju membudidayakannya. Serta mengelola Cikuya sebagai objek wisata umum, yang diresmikan Dinas Kelautan

dan Perikanan serta Disbudparpora tahun 2008 lalu.

Meskipun banyak yang mencari dan mematok kura-kura belawa dengan harga yang tinggi, para warga tak ada yang ingin memperjualbelikannya. Hal itu karena masyarakat setempat sadar betul kura-kura belawa ini telah menjadi warisan nenek moyang.

"Jadi kita bertekad untuk terus menjaga dan membudidayakan satwa tersebut melalui objek wisata Cikuya," jelas Dadan.

Untuk bisa masuk ke wisata Cikuya, pengunjung cukup membayar tiket senilai Rp 5 ribu rupiah bagi orang dewasa. Sementara untuk anak-anak Rp 3 ribu. Setelah itu, para pengunjung akan dimanjakan suasana



alam yang sejuk, dikelilingi pohon-pohon. Serta bisa langsung melihat kura-kura belawa.

Ada sebanyak 300 ekor kura-kura belawa di wisata Cikuya ini, dengan usia yang bervariasi. Dari bayi kura sampai kura dewasa berusia 20 tahunan. Di dalam wisata Cikuya juga terdapat dua buah kolam sebagai tempat tinggal kura-kura belawa. Yaitu kolam untuk bayi atau betikkan kura-kura dan untuk usia dewasa.

Pola perawatan kura-kura belawa pun cukup terbilang sederhana. Dari segi pakannya, kura-kura belawa diberi makan ikan atau daging di pagi dan sore hari. Namun terkadang pengelola juga menambah sedikit umbi-umbian sebagai pakan campuran.

"Biasanya sehari habis 5 kilo daging untuk pakannya, dan menghabiskan anggaran sekitar

Rp 3 juta perbulan," jelas Dadan.

Sementara dari segi kebersihan tempat tinggal kura-kura, tiap 3 bulan sekali para pengelola melakukan pembersihan dengan cara menguras kolam. Di moment itu, mereka juga sekaligus memantau dan memastikan kondisi kura-kura. Jika ditemukan ada yang sakit maka akan dipindahkan atau dipisah karena khawatir penyakitnya menular.

Dadan mengingat tragedi kematian massal kura-kura belawa yang pernah terjadi pada tahun 2010, yang hampir memusnahkan seluruhnya. Ada sekitar 300 ekor kura-kura mati akibat penyakit menular yang dibawa oleh bakteri karena sistem kelola yang belum efektif. Beruntung saat itu 13 ekor lainnya masih bisa diselamatkan, termasuk milik warga setempat.

Tak ingin kehilangan satwa warisan nenek moyangnya, sehingga pengelola terus berupaya agar kura-kura belawa dapat berkembang biak kembali. Dengan belajar secara otodidak, alhasil, pengelola wisata Cikuya bisa mengembangkan. Akhirnya saat ini populasi kura-kura belawa kembali bertambah.

"Karena tragedi itulah, sekarang kami menerapkan pembudidayaan yang lebih berhati-hati. Baik dalam perawatannya maupun pakannya. Pengunjung yang datang juga tidak bisa sembarangan memberi makan," kata Dadan.

Hanya saja, untuk mencapai konsep sesuai tujuan awal didirikannya wisata Cikuya, yakni konservasi dan edukasi lebih luas, tertata, dan maksimal. Pengelola mendapati beberapa kendala. Yaitu mengenai lahannya yang terbatas, sedangkan jumlah atau populasi kura-kura terus bertambah.

"Kami butuh perluasan kawasan untuk mengelola wisata Cikuya ini lebih serius, lahannya hanya 1,2 hektar. Ketika kura-kura jumlahnya semakin bertambah, tidak mungkin juga harus ditumpuk dalam satu kawasan," kata Dadan.

Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni. Wisata berbasis konservasi dan edukasi ini sangat minim akademisi atau tenaga ahli di bidang jenis kura-kura. Padahal, wisata ini terbuka untuk pelestarian dan pengembangan satwa tersebut.

"Kami berharap dengan adanya wisata ini bisa memanfaatkan, melestarikan dan menjaga habitat kura-kura belawa agar tidak punah. Dan menjadi destinasi wisata andalan Kabupaten Cirebon," pungkasnya. •Sar

Susukan Tonggoh Kurangi Urban dengan Desa Wisata

Dalam upaya mengurangi urbanisasi, Pemdes Susukan Tonggoh tengah menyiapkan desa wisata. Seperti apa?



Jalanan terasa begitu sepi. Hiruk pikuk kendaraan yang berlalu-lalang pun dapat terhitung. Sedikit warga yang berseliweran. Begitulah suasana Desa Susukan Tonggoh, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon.

Desa Susukan Tonggoh memang memiliki jumlah penduduk yang sedikit. Tampak hamparan sawah lebih banyak terpendang mengitari hampir seluruh rumah warga.

"Kita memiliki jumlah penduduk sekitar 2.500 warga. Bahkan warga pemilik hak suara saja hanya 1.562 dari 2000 kartu ke-

uarga. Kalau luasnya sekitar 129 hektar, itu pun 85 hektarnya lahan persawahan. Sisanya rumah penduduk," jelas Lubiana, Sekretaris Desa Susukan Tonggoh.

Hal ini membuat pemerintah desa (Pemdes) tengah menencanakan pembangunan desa wisata sebagaimana visi misi Kuwu Susukan Tonggoh Samsudin.

"Kita sekarang lagi bertahap, sekarang yang baru selesai di bangun Omah Kebon. Dan yang sekarang lagi proses adalah bumi perkemahan di Kawijaran. Kita akan terus berupaya agar pembangunan tersebut cepat selesai dalam waktu singkat, sebagai

upaya untuk membantu meningkatkan PAD," ungkapnya.

Selama ini, Pemdes Susukan Tonggoh hanya mampu menghasilkan PAD sekira Rp 15 juta per tahun. Dana tersebut merupakan pemasukan dari penyewaan ruko dan tanah titisara. Hal tersebut yang menjadi pemicu Pemdes akan berbenah sebaik mungkin dalam meningkatkan PAD.

"Dari titisara dapat Rp 7 juta. Selebihnya dari 6 ruko yang kita punya. Kadang juga lebih besar titisara karena harganya tidak stagnan. Kalau tanah titisara milik Pemdes ada 3 hektar," jelas Lubiana.

Selain itu, Lubiana menencanakan pembangunan desa wisata bertujuan agar masyarakat bisa mengelola dan tak perlu lagi mencari pekerjaan di luar kota. Karena hingga sekarang problem yang terjadi, banyak masyarakat yang urban karena mencari pekerjaan.

"Kami sebagai Pemdes akan menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal dalam mengelola wisata tersebut. Kita kelola dengan memberdayakan karang taruna. Apalagi masyarakat di sini terutama pemuda sudah tidak berminat lagi dalam bertani, orang-orang yang bekerja di luar pun beragama. Tapi lebih banyaknya menjadi kuli bangunan," katanya. •lan

Purwawinangun Iktikad Tumbuhkan Literasi Warga

Pemdes Purwawinangun berkeinginan menumbuhkan minat baca warga. Ruang pojok desa pun akhirnya disulap jadi persiapan. Seperti apa?

Lima tahun sudah Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala gencar bersosialisasi untuk peduli literasi kepada warganya. Terbukti, Pemerintah Desa (Pemdes) Purwawinangun menyediakan fasilitas perpustakaan untuk para warganya. Sembari menunggu pelayanan desa atau mengisi waktu luang, para warga bisa dengan santai membaca berbagai jenis buku gratis.

"Puluhan buku kita susun rapih sesuai *genre* untuk menjadi bahan bacaan warga, dengan tujuan agar menumbuhkan minat baca bagi masyarakat. Jangan sampai dengan adanya kemajuan teknologi menjadikan minat baca generasi muda menjadi lemah," ujar Nurrudin, Sekretaris Desa Purwawinangun.

Perpustakaan yang ada di pojok kantor desa itu, mulanya hanyalah ruangan kosong tak terpakai hingga Kuwu Purwawinangun pun menginisiasi untuk merubahnya menjadi tempat produktif.

Sosialisasi juga acap kali dilakukan, melalui acara-acara yang diadakan PKK maupun Karang Taruna. "Jadi sambil mengikuti acara, kita sediakan bahan bacaan. Kita juga bekerjasama dalam pengadaan bahan buku bacaan untuk perpustakaan," tambah Nurrudin.

Alhasil karena perpustakaan-nya aktif, Pemdes Purwawina-



ngun juga pernah mengikuti perlombaan perpustakaan yang diadakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sekalipun hasilnya belum memuaskan.

"Kita belum ada tembusan mengenai perlombaan itu. Mungkin memang belum lolos," ujarnya.

Namun Nurrudin mengeluhkan, karena hingga sekarang perlombaan itu belum ada tindak lanjutnya. Padahal ia membutuhkannya untuk menjadi bahan evaluasi.

"Kita berharap kan bisa diberi saran atau masukan mengenai pengelolaan perpustakaan. Dengan kata lain mereka harus lebih memperhatikan perpustakaan yang ada di desa-desa

atau yang di lembaga lain agar bisa berkembang," jelasnya.

Saat ini, Pemdes Purwawinangun berencana akan membangun gedung khusus untuk perpustakaan. "Harapannya kedepan tersedia gedung khusus perpustakaan agar bagi para pembaca bisa lebih nyaman dan lebih luas tentunya," ungkapnya.

Pemdes Purwawinangun juga membuka lebar-lebar bagi yang ingin mendonasikan bahan bacaan. "Kita membutuhkan banyak bahan bacaan tentang buku pendidikan bagi para pelajar SD, SMP dan SMA. Karena kita punya tanggung jawab, kepada mereka sebagai generasi kedepan supaya lebih giat membaca," pungkas Nurrudin. •Soy

Waleddesa Sandang Prestasi Tertib Administrasi

Waleddesa mampu lakukan pembangunan di luar dana desa. Selain itu ada prestasi yang ditoreh. Seperti apa?



Moh. Halwani (Kepala Desa Waleddesa)

Pandemi Covid 19 setidaknya membuat aktivitas serba terbatas. Baik aktivitas kemasyarakatan maupun pemerintahan. Begitupun dampaknya terhadap *refocusing* anggaran pembangunan yang tak bisa dihindari demi memutus rantai virus. Namun, itu semua tidak menyurutkan semangat Desa Waleddesa, Kecamatan Waled, demi meraih kesejahteraan warganya.

Meski anggaran pembangunan desa sebagian besar dialokasikan untuk penanganan covid, Pemdes Waleddesa tak kehilangan akal. Melalui koneksi dan relasi, Waleddesa akhirnya tetap bisa melaksanakan berb-

agai program pembangunan dari usahanya mencari peluang bantuan pemerintah kabupaten maupun provinsi.

"Kami aktif mencari program dan mengajukan proposal, tidak hanya menunggu. Karena dari dana desa sudah diplotkan masing-masing dan tidak cukup. Karena itu, saya berusaha mencari program di beberapa dinas atau provinsi yang tidak terserap," terang Kuwu Waledesa Halwani.

Siapa sangka, dari keaktifan Pemdes Waleddesa melihat peluang. Mereka pun bisa menyerap anggaran pembangunan sebanyak Rp 700 juta rupiah di tahun 2020 lalu. Angka tersebut

merupakan jumlah dari berbagai program pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Beberapa program tersebut, yakni pembangunan satu unit saluran irigasi sepanjang 250 meter di area persawahan milik warga. Yang berasal dari Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kabupaten Cirebon. Sehingga, yang mulanya air tidak sampai ke sawah, sekarang petani jadi dipermudah.

Selanjutnya, Waleddesa juga mengajukan dan menerima bantuan program lampu Penerangan Jalanan Umum (PJU) dari pemerintah provinsi Jawa Barat sebanyak 10 titik. PJU di perbatasan jalur provinsi yang dulunya masih manual pun sekarang sudah diganti dengan solar sel.

"Juga dapat pompa 1 unit dari Dinas Pertanian, 6 unit rutilahu dari Baznas dan pengaspalan jalan desa dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon," papar Halwani.

Meski baru menjabat satu tahun sebagai Kuwu Waleddesa, Ia mengaku banyak menerima laporan kalau masyarakat bisa merasakan perubahan di desanya. Terlebih ketika melihat bangunan kantor kepala desa yang dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya.

Selain kemandirian Waleddesa dalam menghadapi dampak pandemi Covid 19 tersebut, Waleddesa pun menyandang prestasi tertib administrasi. Penilaian itu diberikan oleh Kecamatan Waled dan Inspektorat dengan poin A- sebagai pegerjaan fisik pembangunan dan administrasi paling rapih.

"Kami ingin membangun desa, kami ingin semua tertib dari mulai administrasi hingga pembangunan agar desa kami lebih maju lagi," harapnya. •Sar

Ciledug Wetan Rencana Desain Baru Taman Kabuyutan

Taman Kabuyutan milik Bumdes Ciledug Wetan dapat dinikmati secara cuma-cuma. Saat ini mereka tengah mendesain ulang agar lebih menarik.



Sejak 2019, Ciledug Wetan tengah fokus mengembangkan potensi desanya. Mereka pun sedang sibuk mengembangkan destinasi wisata bernama Taman Kabuyutan yang digagas oleh Pemerintah Desa.

Taman Kabuyutan dibangun diatas lahan milik desa seluas satu hektar. Wisata ini menyediakan beberapa spot. Mulai dari motor ATV yang mampu membawa pengunjung berkeliling menikmati indahnya pemandangan alam desa, hingga saung bambu yang nyaman untuk beristirahat.

Para pengunjung pun akan

dimanjakan saat mengitari Taman Kebuyutan melalui jalan yang juga terbuat dari bambu. Keindahan wisata ini bisa dapat dinikmati secara gratis tiap Senin hingga Jumat. Sedangkan jika di akhir pekan, pengunjung diharuskan merogoh kocek senilai dua ribu rupiah. Adapun untuk bermain motor ATV, pengunjung cukup mendaftar dengan tiket seharga Rp 10.000 ribu.

Kepala Bumdes Ciledug Wetan Tely Fanda mengatakan, awalnya wisata Taman Kabuyutan ramai dikunjungi wisatawan. Namun sejak tahun 2020 jumlah pengunjung berkurang. Hal tersebut lantaran kondisi

tengah pandemi Covid 19.

Tely juga mengungkapkan, sepiunya wisata Taman Kabuyutan dikarenakan konsep wisata yang telah dibentuk masih kurang menarik. Sehingga, diperlukan pengembangan. Untuk itu agar mampu menarik lebih banyak pengunjung, ia berencana menghilangkan beberapa spot yang telah ada dan menggantinya dengan nuansa baru.

"Saat ini wisata Taman Kabuyutan masih kita buka, tetapi untuk flaying fox ditutup dan akan dihilangkan. Karena tidak ada parameter dalam sisi keamanannya," ucap Tely.

Bumdes Ciledug Wetan telah mengonsep Taman Kabuyutan dengan penambahan destinasi *water park*, gazebo, dan permainan anak. Saat ini, konsep destinasi wisata sendiri sudah diajukan ke Kementerian Desa tahun ini. Tely berharap, Kementerian Desa bisa secepatnya memberikan suntikan dana agar konsep tersebut bisa segera dibangun.

Ia juga berharap konsep baru Taman Kabuyutan ditargetkan bisa mendatangkan banyak wisatawan dan membuahkan hasil bagi masyarakat sekitar.

"Kita berharap orang datang wisata ini wisata menikmati alamnya, kolam renang, bangunan-bangunan khas zaman dulu serta permainan anak. Desainnya sudah jadi semua, tinggal menunggu respon dari Kementerian Desa," pungkasnya. •Muiz

Mohamad Luthfi



Musyawaharah Ketupat

Saat lebaran, biasanya ketupat menjadi makanan yang dikangeni. Wajib ada di meja makan. Namun, benarkah demikian? Bukankah setiap saat orang bisa membuat dan makan ketupat? Lantas apa sebenarnya yang dirindukan?

Dalam momen Idul Fitri, ketupat adalah salah satu medium pertemuan. Keluarga dari berbagai daerah berkumpul, makan ketupat bersama. Pada kesempatan itulah berbagai hal dibicarakan, mulai dari yang sepele hingga ke masalah keluarga yang serius, seperti rencana pernikahan hingga penyelesaian warisan.

Suasana obrolan keluarga besar, yang biasanya diawali dengan acara saling memaafkan itu, begitu hangat, positif, dan solutif. Diiringi canda gurau, santai, tanpa harus ngotot, apalagi gebrak meja. Asyiklah pokoknya. Begitulah musyawarah dengan hidangan ketupat lebaran. Selalu dirindukan.

Tahukah Anda bahwa ketupat bukan hanya ada di Indonesia. Ia juga ada di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bahkan Filipina. Di kawasan Melayu dikenal dengan nama ketupat. Di Filipina (bahasa Tagalog) dikenal dengan bungnoy.

Bagaimana dengan di Indonesia? Juga punya nama yang berbeda di beberapa daerah. Bali: tipat, Banjar: katupat, Betawi: tupat, Gorontalo: atupato, Jawa/Sunda: kupat, Madura: ketopak, Makassar: katupa', Minangkabau: katupek, dan Sasak: topat.

Sekarang coba Anda bayangkan: ada keluarga di Cirebon memiliki enam anak. Keenamnya sudah menikah, dan merayakan lebaran bersama di Cirebon. Saat pulang shalat id para menantu berbincang:

yang satu bilang bahwa ingin segera makan katupek, yang kedua ingin makan ketopak, berikutnya tak sabar hendak makan kupat, atupato, tipat, dan terakhir ingin makan bungnoy. Silakan telusuri keluarga Cirebon itu memiliki menantu dari mana saja.

Pertanyaannya: apakah di meja makan keluarga Cirebon itu ada enam jenis menu pokok? Tidak, hanya satu ketupat. Berbeda-beda nama, tapi tetap satu ketupat. Dalam meja makan itulah perbedaan nama itu lebur dalam satu wujud.

Selain beda nama ketupat juga memiliki bentuk yang berbeda, bukan hanya berbentuk belah ketupat, tapi juga ada yang segitiga, persegi panjang, bahkan ada yang seperti kuntum bunga.

Perbedaan bentuk itu juga melahirkan nama ketupat yang berbeda, ada ketupat jago, berbentuk segitiga sama kaki, ketupat ini biasanya ada di Kudus. Ada juga ketupat tumpeng (kerucut), sidalungguh, sari, bata, sidapurna, bebek, geleng, bagea, pendawa, gatep, dan ketupat sintok. Nah, ketupat sintok

(debleng) inilah yang kerap kamu temui saat lebaran, berbentuk belah ketupat sempurna.

Ketupat mempunyai nama bermacam-macam juga bentuk berbeda-beda, namun mereka tetap satu ketupat. Makanan yang disantap penuh dengan kekeluargaan, positif, dan solutif. Jika kita tarik dalam konteks keindonesiaan, maka meski kita berbeda-beda suku, warna kulit, dan postur (bentuk) tubuh, namun tetap satu Indonesia. Untuk itulah, mari bangun negara ini dengan semangat musyawarah ketupat.





PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Mengucapkan:

*Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1442H*

Mohon Maaf Lahir & Batin

